

**PENERAPAN ASAS *RECHTSVERWERKING* DALAM PEROLEHAN
HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
DI SUMATERA BARAT)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meperoleh Gelar Magister



Oleh :
RETNO NURUL YAUMI
NIM : 2020122034

Dosen Pembimbing:
Dr. Azmi Fendri., S.H., M.Kn.
Dr. Yasniwati., S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

PENERAPAN ASAS *RECHTSVERWERKING* DALAM PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN DI SUMATERA BARAT)

(Retno Nurul Yaumi, 2020122034, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 108 halaman, 2023)

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh setiap pemegang hak. Hal ini kemudian diakomodir dalam asas *rechtsverwerking* di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang memberi batas waktu hingga 5 tahun untuk dapat menggugat sertifikat yang diterbitkan. Namun, dalam kenyataannya setiap orang yang merasa memiliki bukti yang cukup masih diberi kesempatan untuk mematahkan kebenaran data yang tertuang dalam Sertifikat meskipun masa 5 tahun sudah terlampaui. Tesis ini membahas tentang lembaga *Rechtsverwerking* sebagai salah satu sarana memperoleh hak atas tanah dalam sistem pertanahan di Indonesia. Permasalahan dari penelitian ini mengenai mekanisme perolehan hak atas tanah melalui lembaga *rechtsverwerking* dan penerapan *rechtsverwerking* dalam putusan pengadilan di Sumatera Barat, yaitu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lbs, dan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN. Pnn. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap prinsip asas *rechtsverwerking* pada putusan pengadilan di Sumatera Barat ? dan Mengapa Hakim tidak menerapkan asas *rechtsverwerking* pada putusan pengadilan di Sumatera Barat ?. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terhadap prinsip asas *rechtsverwerking* dan mengapa hakim tidak menerapkan asas *rechtsverwerking* pada putusan pengadilan di Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal serta literatur-literatur dan sitasi terkait penerapan asas *rechtsverwerking*. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lbs, dan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pnn tidak menerapkan asas *rechtsverwerking*. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan hak adat, maka tidak ada daluwarsa.

Kata Kunci: Asas *Rechtsverwerking*, Hak Atas Tanah, Putusan Pengadilan.

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF RECHTSVERWERKING IN THE ACQUISITION OF LAND OWNERSHIP RIGHTS ON COURT DECISIONS IN WEST SUMATERA

(Retno Nurul Yaumi, 2020122034, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 107 pages, 2023)

ABSTRACT

Legal protection of land rights is a goal that every right holder wants to realize. This is then accommodated in the principle of *rechtsverwerking* in Government Regulation Number 24 of 1997 which gives a time limit of up to 5 years to be able to challenge the certificate issued. However, in reality, anyone who feels they have sufficient evidence is still given the opportunity to break the truth of the data contained in the certificate even though the 5 years period has been exceeded. This thesis discusses the institution of *rechtsverwerking* as one of the means of obtaining land rights in the land system in Indonesia. The problem of this research is the mechanism of obtaining land rights through the institution of *rechtsverwerking* and the application of *rechtsverwerking* in court decisions in West Sumatera, namely Lubuk Sikaping District Court Decisions Number 8/Pdt.G/2017/PN. Lbs, and Painan District Court Decisions Number 22/Pdt.G/2015/PN.Pnn. The formulation of the problem in this research is: 1) How is the application of the *rechtsverwerking* principle in national land registration? 2) how is the judge's consideration of the principle of *rechtsverwerking* (study of several court decisions in West Sumatera)? This research aims to analyze the existence in the application of the principle of *rechtsverwerking* in the acquisition of land rights in court decisions in West Sumatera. This research is a normative research with conceptual approach method, legislation and case approach. Primary legal material consist of laws and regulations and related court decisions that are related to and explain the problems of primary legal material consisting of books, journals and literature and citations related to the application of the principle of *rechtsverwerking*. Based on the result of this study, the Lubuk Sikaping District Court Decision Number 8/Pdt.G/2017/PN Lbs, and the Painan District Court Decision Number 22/Pdt.G/2015/PN.Pnn did not apply the principle of *rechtsverwerking*. The panel judges was of the opinion that in cases relating to customary rights, there is no expiration.

Keywords: *rechtsverwerking*, landrights, adjudication

